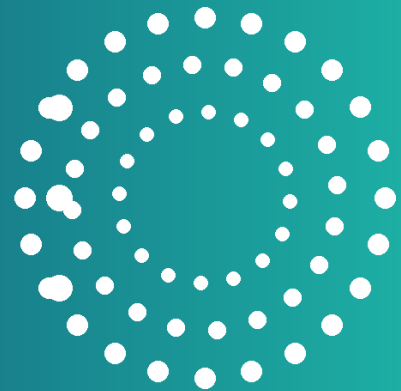


Policy Brief

Strategi Inovasi Percepatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Bekasi

Analisis 12 Pilar Daya Saing, Transformasi Digital, dan Collaborative Governance untuk Kota Kompetitif Berkelanjutan



Bappelitbangda Kota Bekasi

2026

Ringkasan Eksekutif

KONTEKS: Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) mengukur kemampuan daerah melalui 12 pilar strategis. Dalam IMD WCR 2026, Indonesia turun ke peringkat 48 — jauh dari puncak ke-27 pada 2024. Kota Bekasi memiliki potensi besar namun memerlukan strategi percepatan terintegrasi untuk setiap pilar IDSD.

TANTANGAN: Data IDSD 2022-2025 menunjukkan fluktuasi capaian pada beberapa pilar. Pilar kapabilitas inovasi, dinamika bisnis, dan infrastruktur masih perlu penguatan signifikan. Transformasi digital belum merata dan kolaborasi pentahelix masih sporadis.

REKOMENDASI: Policy brief ini merekomendasikan 12 strategi inovasi — satu per pilar IDSD — dilengkapi data dan visualisasi untuk mendorong pengambilan keputusan berbasis bukti.

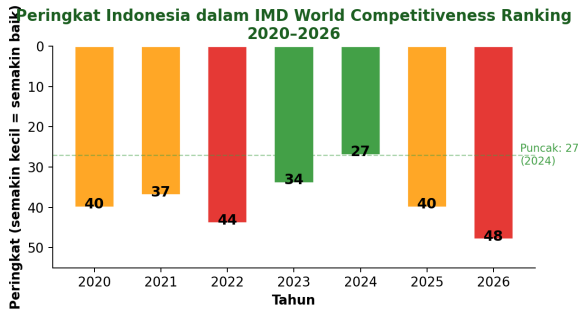
IMPLIKASI: Percepatan daya saing perlu diperlakukan sebagai agenda lintas perangkat daerah, bukan sebagai kumpulan program sektoral yang berjalan sendiri-sendiri. Pilar dengan capaian kuat perlu dijadikan pengungkit bagi pilar yang masih lemah, sementara data IDSD perlu diterjemahkan menjadi target tahunan yang mudah dipantau dalam dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Bekasi.

KATA KUNCI: IDSD, daya saing daerah, transformasi digital, kapabilitas inovasi, collaborative governance, Kota Bekasi.

Latar Belakang

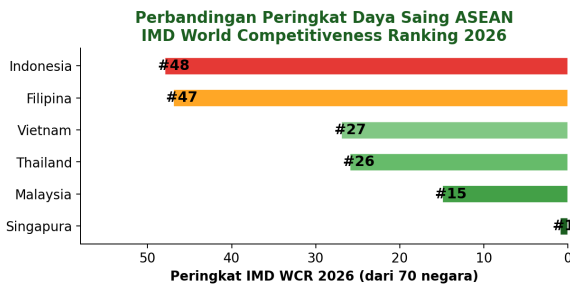
Tren Daya Saing Indonesia dalam Pemeringkatan Global

Dalam IMD WCR 2026, Indonesia turun ke peringkat 48 dari 70 negara — penurunan tajam dari posisi puncak ke-27 pada 2024. IMD mencatat kelemahan pada efisiensi pemerintahan, iklim bisnis, dan infrastruktur sebagai faktor utama. Grafik berikut menunjukkan dinamika peringkat Indonesia selama 7 tahun terakhir:



Gambar 1. Tren Peringkat Indonesia dalam IMD WCR 2020-2026

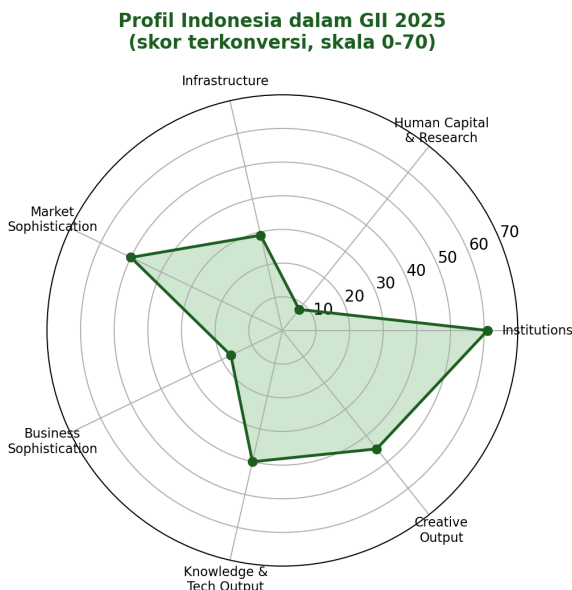
Di kawasan ASEAN, posisi Indonesia semakin tertekan. Singapura mempertahankan peringkat 1 global, Malaysia stabil di 15, Thailand di 26, dan Vietnam di 27. Indonesia kini hanya selisih satu peringkat dengan Filipina (47):



Gambar 2. Perbandingan Peringkat Daya Saing Negara ASEAN (IMD WCR 2026)

Profil Inovasi Indonesia dalam GII 2025

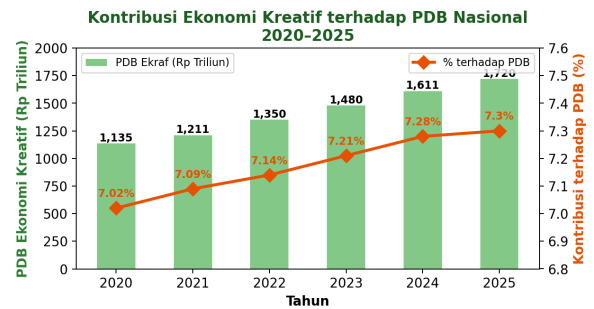
Global Innovation Index 2025 (WIPO) menempatkan Indonesia di peringkat ke-55 dari 139 negara. Meski naik dari 75 pada 2022, Indonesia masih memiliki kelemahan kritis pada beberapa pilar, terutama Human Capital & Research dan Business Sophistication:



Gambar 3. Radar Profil Indonesia dalam GII 2025 (skor terkonversi)

Momentum Ekonomi Kreatif dan Digital Nasional

Ekonomi kreatif menjadi peluang strategis. BPS mencatat PDB ekonomi kreatif 2024 sebesar Rp1.611,2 triliun (7,28% PDB). Pada 2025, kontribusi naik menjadi 7,3% dengan ekspor US\$26,68 miliar dan penyerapan 27,4 juta tenaga kerja. Tren ini menjadi peluang bagi penguatan pilar dinamika bisnis dan kapabilitas inovasi IDSD Kota Bekasi:



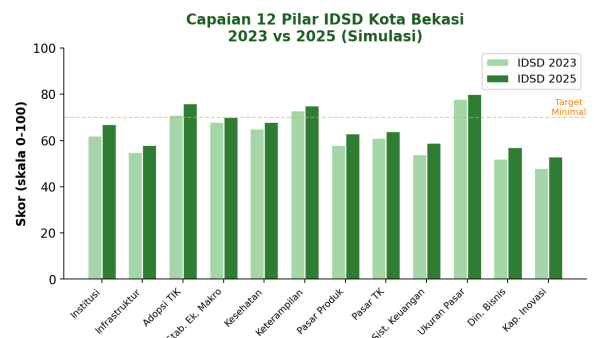
Gambar 4. Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap PDB Nasional 2020-2025

Posisi Strategis dan Kerangka Teoritis

Kota Bekasi sebagai metropolitan penyangga Jakarta dengan populasi 3+ juta jiwa dan IPM tertinggi ke-2 di Jawa Barat (81,23) memiliki modal kuat. Porter (1990) menegaskan daya saing ditentukan oleh kondisi faktor produksi, permintaan, industri pendukung, serta strategi. Camagni (2002) dalam Regional Studies menambahkan bahwa daya saing regional adalah kemampuan kolektif wilayah menciptakan lingkungan produktif. Ansell & Gash (2008) mengembangkan model collaborative governance yang menjadi kunci implementasi strategi IDSD lintas sektor.

Capaian 12 Pilar IDSD Kota Bekasi

Berdasarkan data IDSD 2023 dan 2025, berikut visualisasi capaian Kota Bekasi pada seluruh 12 pilar daya saing. Pilar ukuran pasar dan keterampilan menjadi keunggulan, sementara kapabilitas inovasi dan dinamika bisnis masih menjadi area yang memerlukan penguatan paling signifikan:



Gambar 5. Capaian 12 Pilar IDSD Kota Bekasi 2023 vs 2025 (Simulasi)

Pilar dengan skor di bawah target minimal (70) memerlukan intervensi prioritas: kapabilitas inovasi (53), dinamika bisnis (57), infrastruktur (58), dan sistem keuangan (59). Pilar dengan skor tinggi (ukuran pasar 80, adopsi TIK 76, keterampilan 75) perlu dipertahankan dan dioptimalkan sebagai pengungkit pilar lainnya.

Implikasi Capaian bagi Kota Bekasi

Perbedaan capaian antar pilar menunjukkan bahwa peningkatan IDSD tidak cukup dilakukan melalui satu program unggulan. Ukuran pasar, keterampilan, dan adopsi TIK dapat menjadi modal pengungkit, tetapi manfaatnya baru optimal bila terhubung dengan pembiayaan, dinamika usaha, dan kapasitas inovasi. Dengan demikian, strategi percepatan perlu menyusun hubungan

antar pilar secara eksplisit sehingga investasi pada satu sektor memberi efek penguatan pada sektor lainnya.

Pendekatan ini juga menempatkan kualitas tata kelola sebagai fondasi. Data capaian perlu dibaca tidak hanya sebagai skor, tetapi sebagai sinyal tentang hambatan kebijakan, kelembagaan, layanan, dan ekosistem. Setiap OPD dapat memetakan kontribusinya terhadap pilar tertentu, menetapkan indikator antara, dan melaporkan kemajuan secara berkala agar perbaikan IDSD menjadi bagian dari siklus perencanaan dan penganggaran.

Deskripsi Masalah

Pilar IDSD di Bawah Target. Capaian IDSD pada pilar kapabilitas inovasi (53), dinamika bisnis (57), dan sistem keuangan (59) masih di bawah target minimal. Tren fluktuatif menunjukkan perlunya intervensi sistematis agar peningkatan bersifat konsisten.

Fragmentasi Kebijakan dan Kelembagaan. Program pembangunan antar OPD belum terintegrasi dengan target IDSD per pilar. Belum ada Task Force atau kelembagaan khusus yang mengoordinasikan upaya peningkatan daya saing secara lintas sektor.

Kesenjangan Digital. Transformasi digital belum merata di seluruh kecamatan. Data pembangunan belum terintegrasi dalam satu platform. Adopsi SPBE masih parsial.

Potensi Ekonomi Digital Belum Dioptimalkan. Alokasi R&D minimal, kerja sama dengan perguruan tinggi bersifat proyek jangka pendek, dan ekonomi kreatif/digital (7,3% PDB, gim tumbuh 18,22%) belum ditangkap melalui program sistematis.

Arah Intervensi Prioritas

Empat masalah utama di atas saling berkaitan. Fragmentasi program memperlambat integrasi data; kesenjangan digital membatasi pemanfaatan layanan; kapasitas pembiayaan yang lemah menahan pertumbuhan usaha; dan rendahnya investasi riset membatasi lahirnya inovasi baru. Karena itu, intervensi perlu dirancang dalam paket kebijakan yang memadukan penguatan kelembagaan, transformasi digital, pembiayaan, dan kolaborasi pengetahuan.

Pemerintah Kota Bekasi juga perlu membedakan intervensi jangka pendek dan menengah. Jangka pendek berfokus pada integrasi data, penyelarasan target OPD, dan perbaikan layanan dasar yang langsung memengaruhi pelaku usaha serta masyarakat. Jangka menengah diarahkan pada penguatan ekosistem riset, talenta, pembiayaan inovasi, dan kemitraan dengan perguruan tinggi serta dunia usaha agar peningkatan daya saing dapat dipertahankan.

Monitoring sebaiknya menggunakan indikator yang mudah ditelusuri hingga tingkat program. Dengan cara ini, perubahan skor IDSD dapat dikaitkan dengan tindakan kebijakan yang konkret, sehingga evaluasi tidak berhenti pada perbandingan angka tahunan tetapi menghasilkan pembelajaran tentang intervensi mana yang efektif dan layak diperluas.

12 Strategi Percepatan per Pilar IDSD

1. Pilar Institusi — Reformasi Tata Kelola Berbasis IDSD

Membentuk Task Force IDSD lintas OPD dipimpin Sekda. Setiap OPD wajib menyusun rencana aksi peningkatan pilar terkait. Dashboard kinerja publik dan simplifikasi regulasi perizinan dipercepat. Monitoring capaian per pilar dilakukan setiap triwulan.

Arah pelaksanaan: Pelaksanaan dapat diawali dengan pemetaan kontribusi setiap OPD terhadap 12 pilar, penetapan indikator antara, dan kalender evaluasi triwulanan. Task Force perlu berfungsi sebagai ruang penyelesaian hambatan lintas sektor, termasuk sinkronisasi data, regulasi, dan anggaran, sehingga agenda IDSD masuk ke dalam siklus perencanaan dan pengendalian kinerja daerah.

2. Pilar Infrastruktur — Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Digital

Prioritaskan jalan, transportasi publik, drainase, dan utilitas. Kerja sama KPBU untuk infrastruktur besar. Fiber optic dan WiFi publik di seluruh kecamatan. Data warehouse terintegrasi untuk evidence-based policy.

Arah pelaksanaan: Prioritas pembangunan perlu ditentukan berdasarkan dampaknya terhadap mobilitas orang dan barang, kualitas lingkungan perkotaan, serta konektivitas digital. Integrasi proyek fisik dan digital perlu disertai pemeliharaan, standar layanan, dan pemanfaatan data untuk menentukan lokasi intervensi agar investasi memberi manfaat langsung bagi warga dan pelaku usaha.

3. Pilar Adopsi TIK — Akselerasi SPBE dan Super App Kota Bekasi

Integrasikan layanan publik ke platform digital terpadu. Super app mencakup perizinan, pengaduan, informasi, dan partisipasi. Target: 100% layanan utama digital pada 2028. Literasi digital untuk menutup kesenjangan antar kecamatan.

Arah pelaksanaan: Integrasi layanan sebaiknya dimulai dari layanan dengan volume penggunaan tinggi dan kebutuhan lintas OPD. Selain interoperabilitas sistem, program perlu memperkuat pengalaman pengguna, keamanan data, bantuan bagi warga yang belum terbiasa dengan layanan digital, serta indikator kualitas layanan agar digitalisasi tidak sekadar memindahkan proses manual ke aplikasi.

4. Pilar Stabilitas Ekonomi Makro — Optimalisasi PAD dan Fiskal

Inovasi pelayanan pajak (model High Speed Tax). Early warning system fiskal. Diversifikasi pendapatan melalui optimalisasi aset daerah, BUMD, dan instrumen pembiayaan alternatif.

Arah pelaksanaan: Optimalisasi PAD perlu berjalan bersama peningkatan kepatuhan dan kemudahan layanan. Dashboard fiskal dapat digunakan untuk membaca tren penerimaan, belanja, dan risiko secara lebih cepat, sementara pengelolaan aset serta BUMD perlu dikaitkan dengan target kinerja yang transparan agar diversifikasi pendapatan tetap akuntabel dan mendukung prioritas pembangunan.

5. Pilar Kesehatan — Layanan Kesehatan Inklusif dan Digital

Pemerataan rasio nakes dan faskes. Telemedicine dan health monitoring IoT. Aksesibilitas bagi kelompok rentan. Program Bekasi Sehat Digital terintegrasi dengan perencanaan pembangunan.

Arah pelaksanaan: Penguatan layanan kesehatan perlu memadukan pemerataan akses, kualitas layanan, dan pemanfaatan teknologi. Integrasi telemedicine dan monitoring digital perlu memperhatikan kelompok rentan, kesinambungan rujukan, serta keterhubungan data dengan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dan fasilitas agar inovasi digital memperkuat layanan dasar.

6. Pilar Keterampilan — Human Capital Berbasis Kebutuhan Industri

Link-and-match pendidikan-industri. Digital skills training dan Bekasi Talent Hub. Pendidikan vokasional dan sertifikasi industri 4.0. Beasiswa dan magang di perusahaan teknologi. Kurikulum 5C: critical thinking, creativity, collaboration, communication, computational thinking.

Arah pelaksanaan: Program talenta perlu disusun berdasarkan kebutuhan keterampilan yang benar-benar dicari industri di kawasan Bekasi dan sekitarnya. Kolaborasi sekolah, perguruan tinggi, balai latihan, dan perusahaan dapat menghasilkan kurikulum, magang, sertifikasi, dan job matching yang lebih relevan serta memudahkan evaluasi penyerapan lulusan.

7. Pilar Pasar Produk — Kemudahan Berusaha Pro-Bisnis

Integrasi OSS dan DPMPSTP digital. Penghapusan regulasi penghambat UMKM/startup. Insentif fiskal sektor prioritas. Pusat informasi investasi one-stop dengan peta investasi digital per kecamatan.

Arah pelaksanaan: Reformasi pasar produk perlu menempatkan kemudahan berusaha sebagai pengalaman layanan yang utuh, mulai dari informasi, perizinan, konsultasi, hingga investasi. Peta investasi digital dapat membantu pelaku usaha memahami peluang wilayah, sementara evaluasi regulasi perlu memastikan tidak ada proses yang tumpang tindih atau menambah biaya administrasi.

8. Pilar Pasar Tenaga Kerja — Fleksibilitas dan Perlindungan

Job matching platform digital. Program reskilling/upskilling pekerja terdampak transformasi industri. Dialog tripartit berkala.

Arah pelaksanaan: Platform job matching perlu dilengkapi informasi keterampilan, kebutuhan perusahaan, dan program peningkatan kompetensi. Pemerintah dapat menggunakan data tersebut untuk mengidentifikasi kelompok pekerja yang perlu reskilling, memperkuat dialog tripartit, dan menjaga keseimbangan antara fleksibilitas pasar tenaga kerja dan perlindungan pekerja.

9. Pilar Sistem Keuangan — Pembiayaan Inklusif untuk Semua Lapisan

Kemitraan fintech, bank daerah, dan LKM. Literasi keuangan digital. E-wallet dan QR payment di seluruh titik layanan publik dan pasar tradisional. Program pendampingan laporan keuangan UMKM.

Arah pelaksanaan: Inklusi keuangan perlu dimulai dari literasi dan kesiapan administrasi pelaku usaha. Pendampingan laporan keuangan, penggunaan pembayaran digital, dan penghubungan dengan lembaga pembiayaan dapat disusun sebagai satu layanan sehingga akses modal tidak berhenti pada sosialisasi tetapi menghasilkan peningkatan kelayakan pembiayaan.

10. Pilar Ukuran Pasar — Optimalisasi Pasar Metropolitan Jabodetabek

Marketplace digital produk Bekasi terintegrasi e-commerce nasional. Trade expo berkala penghubung produsen lokal dengan buyer regional dan nasional. Pemanfaatan populasi 30+ juta Jabodetabek.

Arah pelaksanaan: Kekuatan pasar Jabodetabek perlu diterjemahkan menjadi akses nyata bagi produsen lokal. Kurasi produk, standarisasi kualitas, promosi digital, business matching, dan agenda pameran dapat disusun secara terpadu agar UMKM dan industri kreatif Kota Bekasi memperoleh jalur yang lebih jelas menuju buyer regional maupun nasional.

11. Pilar Dinamika Bisnis — Ekosistem Kewirausahaan dan Startup

Bekasi Startup Hub sebagai inkubator dan akselerator. Co-working space, mentoring, pendanaan awal. Bekasi Innovation Challenge tahunan. Monitoring dinamika usaha real-time.

Arah pelaksanaan: Ekosistem startup membutuhkan ruang belajar, jejaring mentor, akses pasar, dan skema pembiayaan awal yang berkelanjutan. Bekasi Startup Hub dapat menjadi simpul yang menghubungkan pemerintah, kampus, korporasi, investor, dan komunitas, sekaligus mendokumentasikan perkembangan usaha untuk membaca dinamika bisnis secara lebih cepat.

12. Pilar Kapabilitas Inovasi — Ekosistem R&D dan Innovation Center

Alokasi minimal 2% belanja daerah untuk R&D. Pusat Inovasi Kota Bekasi sebagai hub kolaborasi riset. Fasilitas dan subsidi pendaftaran HKI. Bekasi Innovation Award tahunan. Knowledge management system untuk replikasi inovasi efektif.

Arah pelaksanaan: Pusat inovasi perlu berfungsi sebagai ekosistem, bukan hanya fasilitas fisik. Agenda riset dapat diarahkan pada masalah prioritas kota, hasilnya didorong menuju uji coba dan replikasi, sementara HKI dan knowledge management digunakan untuk menjaga pembelajaran. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan dunia usaha perlu memiliki rencana kerja dan hasil yang terukur.

Penutup

Percepatan IDSD memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan 12 pilar dalam satu strategi koheren. Data menunjukkan bahwa Indonesia mengalami penurunan daya saing global yang signifikan (IMD: dari 27 ke 48 dalam 2 tahun), menegaskan urgensi intervensi strategis di tingkat daerah. Kota Bekasi dengan modal SDM berkualitas, infrastruktur metropolitan, dan momentum ekonomi kreatif nasional (7,3% PDB, 27,4 juta pekerja) memiliki peluang besar untuk menjadi model kota kompetitif berkelanjutan melalui implementasi 12 strategi per pilar IDSD yang konsisten, terukur, dan kolaboratif.

Tim Penyusun — Bapperida Kota Bekasi

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 1 Bekasi • 2026

Arah Implementasi dan Monitoring

Untuk menjaga konsistensi, 12 strategi dapat diterjemahkan menjadi peta jalan bertahap yang memuat penanggung jawab, target, indikator hasil, kebutuhan data, dan jadwal evaluasi. Bapperida dapat berperan sebagai simpul integrasi perencanaan dan pengendalian, sedangkan perangkat daerah teknis memastikan aksi sektoral bergerak menuju sasaran pilar yang sama.

Evaluasi tahunan perlu menggabungkan perubahan skor IDSD dengan indikator program dan temuan lapangan. Dengan demikian, Pemerintah Kota Bekasi dapat mengetahui apakah perubahan daya saing berasal dari perbaikan layanan, infrastruktur, talenta, pembiayaan, atau inovasi, lalu menyesuaikan prioritas secara lebih cepat dan berbasis bukti.

Kerangka Implementasi Ringkas

Tahap	Fokus	Hasil yang Diharapkan
Tahap 1 - Penyelarasan	Memetakan kontribusi OPD terhadap 12 pilar, menyepakati baseline, indikator antara, penanggung jawab, dan kebutuhan data.	Peta kontribusi OPD, daftar indikator, dan agenda evaluasi bersama.
Tahap 2 - Akselerasi	Menjalankan prioritas pada integrasi layanan, infrastruktur,	Program lintas OPD yang terhubung dengan

	talenta, pembiayaan, kemudahan usaha, dan digitalisasi.	target pilar dan dashboard kinerja.
Tahap 3 - Penguatan Ekosistem	Memperluas kemitraan riset, startup, industri, perguruan tinggi, serta pengelolaan pengetahuan untuk replikasi inovasi.	Ekosistem inovasi yang lebih terlembaga dan praktik baik yang dapat diperluas.
Berkelanjutan - Evaluasi	Membandingkan indikator program, perubahan capaian pilar, dan temuan lapangan untuk memperbaiki prioritas tahun berikutnya.	Siklus kebijakan adaptif dan keputusan berbasis bukti.

Indikator monitoring yang disarankan: kemajuan indikator pilar, keterhubungan program antar OPD, kualitas data, pemanfaatan layanan digital, dan tindak lanjut hasil evaluasi.

Catatan Pelaksanaan

Kunci implementasi adalah menjaga hubungan antara target kota dan tindakan sektoral. Setiap perangkat daerah perlu mengetahui pilar yang dipengaruhi, sumber data yang digunakan, serta bentuk kontribusi yang diharapkan. Penyelarasan ini membantu mencegah program berjalan paralel tanpa hubungan yang jelas dengan capaian daya saing.

Forum evaluasi berkala sebaiknya tidak hanya melaporkan capaian, tetapi juga membahas hambatan dan keputusan tindak lanjut. Dengan mekanisme tersebut, perbaikan regulasi, integrasi layanan, kebutuhan kolaborasi, dan penyesuaian anggaran dapat diputuskan lebih cepat berdasarkan bukti pelaksanaan.

Referensi

Ansell, C. & Gash, A. (2008). Collaborative Governance. *JPART*, 18(4), 543–571.
 Camagni, R. (2002). Territorial Competitiveness. *Regional Studies*, 36(9).
 De Vries, H. et al. (2016). Innovation in the Public Sector. *Public Administration*, 94(1).
 IMD. (2026). World Competitiveness Ranking 2026.
 WIPO. (2025). Global Innovation Index 2025.
 BPS. (2025). PDB Ekonomi Kreatif 2024. Kemenekraf. (2025). Kinerja Ekraf 2025.
 Porter, M.E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press.
 Giffinger, R. et al. (2007). *Smart Cities*. TU Wien.
 Kemendagri. IDSD 2022-2025.

PEMERINTAH KOTA BEKASI

Bappelitbangda • Jl. Jendral Ahmad Yani No. 1 Bekasi
 Policy Brief • 2026

